

**ROLE OF INSTITUTIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
IN POLICY FORMULATION**
**(Study On Research And Development Division in Development Planning, Research
and Development Agency Of Gresik Local Government)**

Aviv Setiawan Dinworo
Tauran

ABSTRACT

Government activities both in the form of public service and the development programs is always started from the policy. Quality policy should be formulated, in producing quality policy must be backed up data is valid, factual information, and recommended the accurate analysis results. The problem is, not a few policies that do not solve the problem even create new problems. From the realized an important step is the formulation of policy. In the process of policy formulation, knowledge about policy support is needed for consideration, one of them through the research and development. Based on this the importance of the role of research and development institutions in the formulation of policy.

This study aims to describe the role of institutional research and development in policy formulation. The method used is descriptive qualitative approach. The sources of this research is the Head and staff of Research and Development Division in Gresik Local Government. Data collection techniques used in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data display and conclusion.

Results of this study explain that in the application of third role of his theory adapted by Wahab (1999) on the role of institutional policy, research and development is supplying information for the formulation of the problem, provide a scientific structure to determine priorities, and make a recommendation. Institutions that exist in Gresik Local Government is generally going well. One of these processes and activities that will review, in which the results of such studies are used to supply information to the government, made a scientific structure, and in it contains the recommendations to be used in the formulation of policy. However, there are still weaknesses identified, the lack of human resources and infrastructure that can hinder the performance of Research and Development in the application of third role. Expected for the future, for Research and Development is in Gresik local government can improve its role in policy formulation.

Keywords: Role, Institution, Policy Formulation.

**PERAN INSTITUSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
(Studi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik)**

Aviv Setiawan Dinworo

Tauran

ABSTRAK

Kegiatan-kegiatan pemerintah baik yang berupa pelayanan masyarakat maupun program-program pembangunan selalu bermula dari kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan harus berkualitas, dalam menghasilkan kebijakan berkualitas dimaksud harus didukung data yang valid, informasi yang faktual, dan direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Masalahnya, tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah bahkan malah menciptakan masalah baru. Dari itu disadari suatu tahap penting dari kebijakan adalah perumusannya. Dalam proses perumusan kebijakan, diperlukan dukungan pengetahuan seputar kebijakan sebagai bahan pertimbangan, salah satunya melalui hasil penelitian dan pengembangan. Atas dasar inilah peran pentingnya institusi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran institusi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Staff di Bidang Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan ketiga peran yang diadaptasi dari teorinya Wahab (1999) tentang peran institusi kebijakan yakni menyuplai informasi untuk proses perumusan masalah, memberikan struktur ilmiah untuk menentukan prioritas, dan membuat rekomendasi. Institusi penelitian dan pengembangan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Gresik ini secara umum berjalan dengan baik. Salah satunya proses dan kegiatannya adalah melakukan kajian yang digunakan untuk menyuplai informasi, dijadikan struktur ilmiah, dan memuat rekomendasi untuk dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan. Namun, masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi, yakni kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat menghambat kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan ketiga perannya tersebut. Diharapkan untuk kedepannya, Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Gresik ini dapat memperbaiki perannya dalam perumusan kebijakan.

Kata kunci : Peran, Institusi, Perumusan Kebijakan.

Latar Belakang

Kegiatan-kegiatan pemerintah baik yang berupa pelayanan masyarakat maupun program-program pembangunan selalu bermula dari kebijakan. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Kebijakan yang dipilih pemerintah harus mampu membawa perubahan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan mutu pelayanan publik, serta terlaksananya pembangunan. Hal tersebut bermakna bahwa kebijakan yang dirumuskan pemerintah harus benar-benar berkualitas. Namun demikian, Nugroho dalam Pasolong (2011:41) mengatakan tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah tapi malah menciptakan masalah baru. Namun demikian Nugroho dalam Pasolong (2011:41) mengatakan tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah tapi malah menciptakan masalah baru.

Salah satu tahap dalam kebijakan yang penting untuk diperhatikan adalah perumusannya. Agustino (2008:118) menunjukkan pentingnya tahap perumusan kebijakan yang dianggap sebagai kegiatan yang akan menentukan masa depan suatu kehidupan publik, apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Pada perumusan kebijakan, diketahui bahwa pengetahuan seperti hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan di lingkungan pemerintahan melalui penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian empiris yang relevan dengan kebutuhan setempat (Labadjo,2008).

Oleh karena itu, institusi penelitian dan pengembangan menjadi penting dalam proses perumusan kebijakan seperti juga dinyatakan berbagai forum seperti Lokakarya Pemberdayaan Peran dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan di Jakarta pada 2008 menghasilkan kesimpulan bahwa peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi institusi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam tahap perumusan kebijakan.

Namun, institusi penelitian dan pengembangan sendiri tidak lepas dari masalah. Wahab (1999:39-40) menjelaskan lembaga-lembaga untuk tujuan litbang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah seperti di Indonesia masih belum sepenuhnya berkembang akibat tidak ada upaya menjadikan penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dapat bermanfaat bagi proses pembuatan kebijakan pemerintah.

Wahab (1999:39-40) menjelaskan lembaga-lembaga untuk tujuan litbang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah seperti di Indonesia masih belum sepenuhnya berkembang akibat tidak ada upaya menjadikan penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dapat bermanfaat bagi proses pembuatan kebijakan pemerintah.

Dari uraian tersebut, kajian terhadap peran institusi penelitian dan pengembangan dalam proses

perumusan kebijakan menjadi penting untuk diteliti. Sampai saat ini, pemerintah daerah memiliki instansi penelitian dan pengembangan untuk mendukung proses pembuatan kebijakan. Di Kabupaten Gresik keberadaan institusi penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini secara implisit menunjukkan peran strategis institusi penelitian dan pengembangan dalam proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan (Studi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Gresik). Dalam penelitian ini yang akan diungkap adalah peran yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam perumusan kebijakan dengan teori yang diadaptasi dari Wahab (1999) tentang peran institusi-institusi kebijakan yakni menyuplai informasi untuk proses perumusan masalah, memberikan struktur ilmiah untuk menentukan prioritas, dan memberikan rekomendasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana Peran Institusi Penelitian dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi

ini adalah mendeskripsikan Peran Institusi Penelitian dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam studi kebijakan publik khususnya tentang perumusan kebijakan publik. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan penelitian selanjutnya yang sejenis. Bagi instansi tempat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk pengembangan peran litbang khususnya dalam perumusan kebijakan.

Kajian Kebijakan:Perumusan Kebijakan

Setiap suatu pemerintah pasti membutuhkan kebijakan untuk mengarahkan tindakan agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Kebijakan publik juga mencerminkan pilihan-pilihan yang diambil pemerintah. Kebijakan publik sendiri memiliki pengertian diantaranya menurut Anderson dalam Agustino, (2008:7) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Sebelum kebijakan itu ada, pemerintah perlu melakukan satu proses perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Di dalam konsep proses perumusan kebijakan

yang dikemukakan Pasolong (2011:41) terdapat proses analisis kebijakan yang diterjemahkan lebih lanjut kedalam tahap-tahapnya sebagai berikut: 1. Identifikasi masalah, Pada proses ini, dapat diperoleh informasi yang menyangkut masalah kebijakan publik yang diperoleh dari sumber tertulis, seperti hasil penelitian, data sensus, laporan survey, jurnal, koran, dan sebagainya. 2. Identifikasi alternatif, Berdasarkan masalah yang diperoleh pada proses sebelumnya, dicari model dan teori yang cocok untuk mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan berdasarkan analisis tersebut dikembangkan alternatif-alternatif kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan. 3. Seleksi alternatif, Seleksi alternatif menurut Quade dalam Pasolong (2011:45) adalah salah satu tahap yang sangat vital. Dalam tahap ini seorang perencana atau *policy analyst* akan melakukan seleksi alternatif terbaik untuk diajukan ke *policy makers*.

Kebijakan publik dalam proses pembuatannya tidak dengan sendirinya atau alami terbentuk tanpa adanya keterlibatan komponen yang berhubungan secara langsung maupun tidak. Terdapat aktor-aktor yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Aktor-aktor inilah yang disebut komunitas kebijakan. Suharto (2010:92) menjelaskan komunitas kebijakan adalah sekelompok individu atau kelompok yang memiliki perhatian langsung maupun tidak langsung dalam sebuah kebijakan dapat diartikan sebagai *stakeholder* yang umumnya terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah, penasihat-penasihat kebijakan serta beragam kelompok

individu, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

Komunitas kebijakan dalam praktiknya dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan bahkan lebih lanjut dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik. Salah satunya institusi kebijakan yang dimaksud Wahab (1999:28) yang menurutnya dapat dibagi menjadi 3 macam menurut perannya masing-masing. 1. Badan-badan administrasi pusat yang berfungsi mempersiapkan dan memproses informasi bagi keputusan-keputusan eksekutif. Selain itu bertugas membantu mempersiapkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman operasional. 2. Institusi-institusi yang bertugas menghimpun informasi mengenai kecenderungan-kecenderungan serta peluang-peluang dilakukannya pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan tertentu dalam persoalan-persoalan pembangunan pada umumnya. 3. Dewan penasihat, komite atau organisasi-organisasi lain yang dibentuk dengan maksud untuk pengembangan dan koordinasi kebijakan.

Untuk menjelaskan peran yang dijalankan institusi kebijakan tersebut, sebagai contoh dari praktik yang lebih dulu mapan dapat diadopsi adalah *The Netherlands Scientific Council for Government Policy* di Belanda tahun 1972 yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyuplai informasi untuk proses perumusan masalah
2. Memberikan struktur ilmiah untuk menentukan prioritas
3. Membuat rekomendasi

Peran Institusi Penelitian dan Pengembangan: Perumusan Kebijakan

Posisi institusi penelitian dan pengembangan sebelumnya telah dijelaskan merupakan bagian dari komunitas kebijakan yang terlibat secara langsung dalam perumusan kebijakan. Berikut peran institusi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan daerah yang diadaptasi dari peran institusi-institusi kebijakan menurut Wahab (1999).

1. Menyuplai informasi untuk proses perumusan masalah.

Sebagaimana Dunn (2000:38) menjelaskan bahwa untuk memperbaiki kebijakan yakni dengan cara menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang digunakan pengambil kebijakan dalam proses perumusannya. Penciptaan, mengkritisi, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut menjadi tugas institusi penelitian dan pengembangan yang harus dimaksimalkan agar dapat mendukung jalannya pemerintahan.

2. Memberikan Struktur ilmiah untuk menentukan prioritas

Dunn (2000:77-78) menjelaskan bahwa di mana pembuatan kebijakan publik dan penilaian sosial adalah hal yang sangat tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfungsi memberi dasar alasan teknis dan ilmiah. Selama perkembangan masyarakat pasca industri, penggunaan metode empiris dan analitis untuk menghasilkan informasi yang bernilai potensial bagi pembuatan kebijakan

3. Membuat rekomendasi

Hal ini juga dijelaskan Leo Agustino di uraiannya dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:114-115)

dengan mengambil contoh kasus Komisi Penasihat yang dibentuk Presiden Amerika Serikat. Leo menjelaskan bahwa peran institusi penasihat kebijakan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi, 2007:33-34). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai informasi untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Adapun fokus penelitian ini adalah Fokus penelitian ini adalah peran institusi litbang atau dalam penelitian ini yakni bidang penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan yakni peran dalam menyuplai informasi untuk proses perumusan masalah, peran dalam memberikan struktur ilmiah untuk menentukan prioritas, dan peran dalam membuat rekomendasi yang ketiganya tersebut dilihat dari proses dan

kegiatan yang dilakukan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu pada informan yang ada di Bidang Penelitian dan Pengembangan yakni Kepala Bidang dan Staff. Caranya dengan pengamatan atau observasi langsung ke tempat penelitian dan melakukan wawancara pada informan. Kedua, Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, literatur-literatur, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008, Website Depdagri, dan buku-buku yang tertulis di daftar pustaka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis, observasi, dan dokumentasi.

Teknis Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan

analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Kemudian dijelaskan kedalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui observasi langsung ke tempat penelitian sekaligus mencari informasi dari informan.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.
3. Penyajian data, yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table atau pun uraian.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan lapangan.

Pembahasan: Peran Institusi Penelitian dan Pengembangan Dalam Perumusan Kebijakan

Peran institusi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan dijelaskan melalui tiga perannya untuk menyuplai informasi untuk proses perumusan masalah, memberikan struktur ilmiah untuk menentukan prioritas, dan membuat rekomendasi.

Menyuplai Informasi Untuk Proses Perumusan Masalah

Institusi penelitian dan pengembangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki keterkaitan dengan perumusan kebijakan dalam hal memberikan masukan atau dapat disebut input kebijakan. Masukan yang diberikan Bidang Penelitian dan Pengembangan berupa informasi yang dihasilkan dari kajian yang dilakukan. Kajian-kajian tersebut seputar masalah-masalah strategis daerah, dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Informasi-informasi tersebut biasa dimanfaatkan oleh berbagai pengguna khususnya dari yang berkaitan langsung dengan kebutuhan akan informasi yang potensial bagi perumusan kebijakan, seperti Bupati dan Wakilnya maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Gresik.

Kajian yang dilakukan Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki dua jenis. Pertama, kajian terjadwal. Kedua, kajian mendesak. Melalui kajian tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan bermaksud mengumpulkan informasi-informasi yang potensial bagi perumusan kebijakan. Hasil Bidang Penelitian dan Pengembangan berupa kajian tersebut menjadi penting dan bermanfaat bilamana informasi-informasi tersebut disampaikan kepada pemerintah. Sama halnya dengan informasi yang berasal dari kajian perencanaan peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2007-2011. Pemerintah Kabupaten Gresik atau lebih khususnya SKPD yang memiliki keterkaitan dengan PDRD (Dinas Pendapatan, Bagian Hukum Setda, Dinas Perhubungan, Pengelola Pasar) perlu tahu bahwa kondisi perekonomian regional telah

berpengaruh kuat terhadap perubahan PDRD Kabupaten Gresik agar kemudian hari perolehan PDRD dapat ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan PDRD semisal Perda tentang Pajak Daerah.

Dalam penyuplaian informasi ilmiah, terdapat cara-cara yang biasa dilakukan Bidang Penelitian dan Pengembangan yakni sebagai berikut:

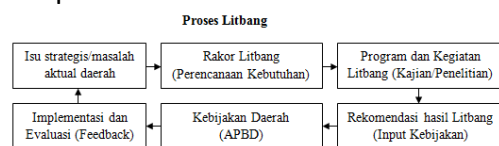
1. Sosialisasi, dilakukan setiap kali kajian diselesaikan, sasarannya adalah SKPD yang terkait dengan kajian.
2. Penyediaan dan penyebaran, hasil-hasil kajian yang memuat informasi disediakan dan disebar dalam bentuk *hardcopy* maupun *softfile*.
3. Melalui media website

Penyampaian informasi atau dalam penelitian ini adalah informasi ilmiah tentang masalah-masalah seputar kebijakan yang dapat bermanfaat bagi perumusan kebijakan atau berguna bagi pengambil keputusan jika informasi tersebut berkualitas (akurat dan teruji kebenarannya, sempurna, tepat waktu, relevan, dan mudah murah).

Yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan cara sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan informasi yang potensial digunakan dalam perumusan kebijakan. Sebagaimana Dunn (2000:36) menjelaskan bahwa pemanfaatan dokumen yang relevan dengan kebijakan atau dalam penelitian ini adalah hasil kajian dari Bidang Penelitian dan Pengembangan, akan meningkat bilamana dikomunikasikan dengan presentasi kebijakan berupa percakapan, konferensi, penerangan, pertemuan, dan dengar pendapat.

Memberikan Struktur Ilmiah untuk menentukan prioritas

Dalam dokumen yang diperoleh peneliti, terdapat bagan yang menjelaskan alur proses litbang dalam memberikan struktur ilmiah dimaksud. Pertama, masalah yang sedang berkembang di masyarakat ataupun dari gejala lingkungan ditampung, kemudian diagendakan kedalam kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, dari itu tahap kedua adalah rapat koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk merencanakan kebutuhan dalam melakukan kajian tentang yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Barulah, tahap ketiga terbentuk program dan terlaksananya kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Pada tahap inilah, struktur ilmiah didapat.



Pada struktur ilmiah itu dapat memuat tujuan kajian, permasalahan yang menjadi perhatian kajian, hasil kajian atau keluaran dari kajian, dan kesimpulan dari masalah yang dikaji. Hal-hal tersebut nantinya dapat membantu pemerintah dalam hal menentukan prioritas. Jadinya, struktur ilmiah seperti karya ilmiah pada umumnya, perbedaanya karya ilmiah ini bernilai praktis lebih banyak di mana dimanfaatkan bagi perumusan kebijakan.

Produk-produk hasil kajian tersebut, diperoleh Bidang Penelitian dan Pengembangan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Kajian kerja sama dengan perguruan tinggi.

2. Kajian kerja sama dengan konsultan

3. Kajian swakelola

Dalam contoh kajian perencanaan peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2007-2011 menghasilkan stuktur ilmiah berupa laporan yang memuat perhitungan peningkatan pendapatan PDRD beserta potensi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga diperoleh kesimpulan bahwa pajak penerangan jalan merupakan PDRD yang memiliki potensi lebih besar dari pada pajak parkir, retribusi parkir, dan retribusi pasar. Kesimpulan lainnya bahwa pajak parkir dan retribusi parkir merupakan PDRD yang menghadapi masalah yang terberat. Potensi masing-masing PDRD telah diproyeksikan selama lima tahun mendatang. Hal-hal inilah yang kemudian dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan prioritas pemerintah PDRD mana yang perlu mendapat perhatian lebih.

Membuat Rekomendasi

Kajian yang dihasilkan tidak hanya memuat informasi maupun struktur ilmiah, melainkan juga memuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat bermanfaat sebagai pertimbangan pilihan tindakan yang perlu dilakukan dalam suatu kebijakan.

Rekomendasi tersebut dapat berupa program atau rencana tindak yang disertai instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi. Misalnya rekomendasi dari kajian perencanaan peningkatan PDRD tahun 2007-2011 untuk pajak penerangan jalan yakni tarif dasar listrik non PLN perlu penyesuaian dengan tarif dasar PLN, instansi

penanggung jawab rekomendasi tersebut adalah Bagian Hukum Setda atau Dinas Pendapatan Daerah.

Menurut Dunn (2000:27) rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan, hal ini membantu pengambil kebijakan dalam menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

Dari uraian yang dikemukakan Dunn tersebut, rekomendasi yang dihasilkan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan cukup baik di mana dalam menghasilkan pengetahuan berupa pilihan atau alternatif berupa program, tindak lanjut, ataupun rencana tindak sudah dilakukan dengan baik melalui kajian yang dilaksanakan sebelumnya. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan Bidang Penelitian dan Pengembangan juga memuat instansi penanggungjawab sebagai pengimplementor dari kebijakan yang nantinya diambil.

Rekomendasi yang dibuat haruslah memiliki karakteristik, sejauh ini institusi penelitian dan pengembangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Gresik cukup baik di mana untuk rekomendasinya: dapat ditindaklanjuti, rekomendasinya dibuat sebelum adanya keputusan, bergantung fakta dan nilai yang ada, memiliki manfaat yang luas.

Selain berkarakter, rekomendasi harus memenuhi kriteria efektif, efisien, kecukupan dan kesamaan.

Sejauh ini dalam melaksanakan perannya dalam perumusan kebijakan, institusi penelitian dan pengembangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Gresik telah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala yang teridentifikasi yakni kurangnya sumber daya manusia dan minimnya sarana prasarana yang mendukung kinerja.

Kesimpulan

Sesuai dengan data yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka kesimpulan penelitian mengenai institusi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan sebagai berikut:

1. Peran institusi penelitian dan pengembangan untuk menyuplai informasi untuk proses perumusan masalah yakni dengan cara menghasilkan kajian yang berkaitan dengan masalah kebijakan dan kemudian diinformasikan kepada *stakeholder* melalui sosialisasi, penyediaan dan penyebaran *hard copy* maupun *soft file*. Institusi penelitian dan pengembangan yang ada di Gresik ini belum melaksanakan penyuplaian informasi melalui media *website*.
2. Peran institusi penelitian dan pengembangan untuk memberikan struktur ilmiah untuk menentukan prioritas yakni menggunakan hasil kajian yang berupa jurnal, buku, maupun laporan, produk kajian tersebut dihasilkan dengan tiga cara yakni kajian kerjasama dengan perguruan tinggi, kajian dengan konsultan, dan kajian swakelola, tiap cara menyesuaikan dengan kondisinya. Maksud dari kajian

yang dikerjasamakan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas hasil kajian untuk struktur ilmiah yang nantinya dapat memperkuat landasan dalam perumusan kebijakan.

3. Peran institusi penelitian dan pengembangan untuk membuat rekomendasi dilakukan dengan hasil kajian sebelumnya dimuat juga didalamnya rekomendasi-rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan. Rekomendasi yang dibuat sejauh ini cukup baik dengan dimuatnya beberapa alternatif berupa rencana tindak yang disertai dengan instansi penanggungjawab agar lebih jelas pelaksanaannya. Kekurangannya, rekomendasi yang diberikan belum memuat penjelasan konsekuensi-konsekuensi di masa datang.
4. Dalam melaksanakan perannya dalam perumusan kebijakan daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan minimnya sarana prasarana dan ini menjadi penghambat kinerjanya.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk segera dikembangkan penyebaran informasi melalui media website agar dalam penyuplaian informasi akan menjadi lebih mudah dan murah.
2. Untuk menghasilkan struktur ilmiah, diharapkan cara-caranya lebih dikembangkan lagi agar

kualitas hasil kajian dapat ditingkatkan lagi. Dan juga diharapkan struktur ilmiah yang diberikan lebih dapat memperkuat landasan perumusan kebijakan.

3. Rekomendasi yang diberikan nantinya harus juga memuat konsekuensi-konsekuensi tentang manfaat dan dampak dimasa akan datang, sehingga rekomendasi dapat lebih rinci dan mudah dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.
4. Perlu penambahan jumlah sumber daya manusia serta perlu ditingkatkan sarana dan prasarananya agar bisa lebih baik dalam menjalankan peran menyuplai informasi, memberikan stuktur ilmiah, dan membuat rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hakim, Aditya Akbar. 2013. *Dekontruksi Kehidupan Beragama Dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: JBS FBS Unesa.
- Labadjo, Noval. 2008. Pengembangan Jejaring Litbang dalam Peningkatan Peran dan Fungsi Litbang bagi Pembangunan Daerah (Tinjauan Kebijakan Depdagri). (online). (<http://noval-labadjo.blogspot.com> di akses 10 Februari 2013).
- Lakitan, Benyamin. 2012. Indikator Kinerja Litbang di Era Informasi Terbuka. *File*, (online). (<http://www.ristek.go.id> diakses tanggal 20 Februari 2013).
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ngadisah. 2007. Lokakarya Pemberdayaan Fungsi Litbang di Daerah. *Seminar/Lokakarya*, (online). (<http://bpp.depdagri.go.id> diakses 15 Februari 2013).
- Oetomo, Dharma. 2002. *Perancangan & Pengembangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabet
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Gresik.
- Prinawati, Wiwit. 2003. Definisi KP. *File*, (online). (<http://elisa1.ugm.ac.id> diakses 14 Februari 2013).
- Soetomo. 2007. *Teori-Teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- Tim Penyusun. 2006. *Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 20 Ayat (1).
- Wahab, Abdul Solichin. 1999. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Danar Wijaya-Brawaijaya University Press.
- Winarnie, Aries Toening. 2010. Kebijakan Publik dalam Aras Otonomi Daerah. *Mimbar Administrasi*, (online). (<http://fisip.untagsmg.ac.id> diakses 14 Februari 2013).

